



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TOTOK BINTORO**
2. Jabatan : **KEPALA**
3. NHK : **643669**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.144.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 670.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
3. Tanah Seluas 153 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 111 m2/100 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/36 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, Rp. 450.000.000
6. Tanah Seluas 1.768 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, Rp. 1.339.500.000
7. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, Rp. 185.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **270.800.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 3.800.000
2. MOTOR, VESPA EXCEL Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOBIL, TOYOTA SUV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	35.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.167.839.130
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.618.139.130
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.618.139.130

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.